

**KEKUATAN PEMBUKTIAN (*BEWIJSKRACHT*) TERHADAP PENGAJUAN
ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI DISERTAI ALAT BUKTI
TERTULIS HASIL AUDIT DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Ahmad Subandi* dan Marcus Priyo Gunarto**

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian alat bukti keterangan ahli disertai bukti tertulis hasil audit dalam perkara tindak pidana korupsi dalam praktik peradilan di Indonesia.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif-empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta data primer berupa wawancara. Proses analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dan bentuk deskriptif yang menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan yang sebenarnya, sehingga dari penelitian ini mampu memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang ada.

Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa: *Pertama* pertimbangan Jaksa Penuntut Umum masih menghadirkan ahli yang telah memberikan bukti tertulis hasil audit dalam perkara tindak pidana korupsi, didasari karena rumit dan carut-marutnya pembuktian tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Jaksa Penuntut Umum menghadirkan ahli untuk menjernihkan persoalan kerugian negara dalam pembuktian tindak pidana korupsi. *Kedua* perlindungan hukum bagi tersangka/terdakwa untuk menghadapi pengajuan kesamaan alat bukti ganda oleh aparat penegak hukum dalam perkara tindak pidana korupsi adalah dengan melalui pemberian bantuan hukum oleh Advokat untuk mendampingi dan membela hak-hak tersangka/terdakwa selama proses peradilan. Adapun bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan berupa; a) memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memimpin jalannya persidangan untuk mengklarifikasi kepada Penuntut Umum terkait keberadaan posisi ahli sebelum mengangkat sumpah di depan persidangan, supaya tidak membingungkan (*confuse*), b) Mengajukan pembelaan kepada terdakwa (*pledoi*) atas pengajuan alat bukti keterangan ahli disertai bukti tertulis hasil audit oleh Penuntut Umum ke dalam pemeriksaan persidangan, c) Mengajukan bukti baru dalam persidangan sebagai bukti pembanding atas bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum. Pembuktian pembanding ini dalam pemeriksaan sidang tindak pidana korupsi sering disebut dengan teori pembuktian terbalik. *Ketiga* kekuatan pembuktian keterangan ahli disertai bukti tertulis hasil audit dalam perkara tindak pidana korupsi adalah memiliki nilai pembuktian yang sama yakni pembuktiannya bersifat bebas dan tidak mengikat mengikat bagi hakim.

Kata kunci : Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Disertai Bukti Tertulis Hasil Audit Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

* Mahasiswa Magister Hukum Litigasi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

** Guru Besar Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

**STRENGTH OF EVIDENCE (*BEWIJSKRACHT*) ON THE SUBMISSION
OF EVIDENCE DESCRIPTION OF EXPERTS WITH EVIDENCE
WRITTEN RESULTS OF AUDIT IN THE
CORRUPTION CASE**

Ahmad Subandi* and Marcus Priyo Gunarto**

Abstract

This study aims to determine and analyze the strength of evidence of expert testimony accompanied by written evidence of audit results in cases of corruption in judicial practice in Indonesia.

This research is a type of normative-empirical research. The data used is secondary data, which consists of primary, secondary, and tertiary legal materials and primary data in the form of interviews. The data analysis process uses qualitative analysis methods and descriptive forms that describe the actual facts or circumstances, so that this research is able to provide conclusions on the existing problems.

The results of the research that have been carried out by the author can be concluded that: First, the consideration of the public prosecutor is still presenting experts who have provided written evidence of audit results in cases of criminal acts of corruption, based on the complexity and chaos of proving corruption that is detrimental to state finances. The Public Prosecutor brings experts to clarify the issue of state losses in proving corruption. Second, legal protection for suspects/defendants to face the submission of double evidence of similarity by law enforcement officers in cases of criminal acts of corruption is through the provision of legal assistance by advocates to assist and defend the rights of suspects/defendants during the judicial process. The forms of legal protection that can be provided are in the form of; a) requesting the Chairperson of the Panel of Judges who preside over the trial to clarify to the public prosecutor regarding the existence of an expert position before taking the oath before the trial, so as not to confuse it, b) Submitting a defense to the defendant (pledoi) for the submission of evidence of expert testimony accompanied by written evidence the results of the audit by the public prosecutor into the trial examination, c) Submitting new evidence in the trial as comparative evidence against the evidence presented by the Public Prosecutor. This comparative evidence in the examination of the trial of corruption is often referred to as the reverse proof theory. Third, the strength of proving expert statements accompanied by written evidence of audit results in corruption cases is that they have the same evidentiary value, namely that the evidence is free and not binding on judges.

Keywords : The Power Of Proving Expert Statements Accompanied By Written Evidence Of Audit Results In Cases Of Criminal Acts Of Corruption.

* Master Of Litigation Law Student, Faculty Of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

** Professor Of Criminal Law, Faculty Of Law, Gadjah Mada University.